



## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN SDGS 4 di KOTA SURABAYA

Ahmad Fahronil Musthofa<sup>1</sup>, Muhammad Kholaf Abiyyu Farros<sup>2</sup>,

Indah Prabawati<sup>3</sup>, Firre An Suprpto<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: [25040674393@mhs.unesa.ac.id](mailto:25040674393@mhs.unesa.ac.id)



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v11i3.2350>

### Sections Info

#### Article history:

Submitted: 11 April 2026

Final Revised: 23 April 2026

Accepted: 16 May 2026

Published: 20 June 2026

#### Keywords:

Education policy Inclusive education Surabaya city Implementation policy SDGs 4



### ABSTRACT

*This research tends to analyze the implementation of quality education policy to assist the Sustainable Development Goals (SDGs) achievement, especially the fourth goal, in the city of Surabaya. This research implements a descriptive qualitative approach with a literature research method that utilizes various data sources, such as scientific journals, policy documents, and previous research results. The outcomes show that the inclusive education policy's implementation in Surabaya city has had a positive impact on increasing access to education, especially for students with special needs. This condition is supported by various programs, including the development of inclusive schools, the stipulation of educational infrastructure and facilities, and improving the competence of teaching staff. However, the implementation policy still meets several obstacles, like the limited number of special assistant teachers, the uneven distribution of educational facilities, and an evaluation system that has not been optimally implemented. Based on policy implementation theory, the success of these policies is affected by factors namely resources, communication, bureaucratic structure, and disposition. Therefore, several attempts are required to strengthen coordination between stakeholders, enhance the quality of human resources, and optimize the evaluation system to assist the achievement of SDGs 4 in a sustainable manner.*

### ABSTRAK

*Penelitian ini ditujukan guna melaksanakan analisis implementasi kebijakan pendidikan berkualitas dalam menunjang tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan keempat, di kota Surabaya. Studi ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik studi literatur yang memanfaatkan beragam sumber data, seperti jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, serta hasil penelitian sebelumnya. Temuan studi memperlihatkan bahwasanya implementasi kebijakan pendidikan inklusif di kota Surabaya sudah memberi pengaruh positif untuk membuat akses pendidikan meningkat, terlebih untuk siswa berkebutuhan khusus. Kondisi ini didukung oleh berbagai program, termasuk pengembangan sekolah inklusif, penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan, serta peningkatan kompetensi tenaga pengajar. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa kendala, seperti jumlah guru pendamping khusus yang terbatas, distribusi fasilitas pendidikan yang tidak merata, dan sistem evaluasi yang belum diimplementasikan secara optimal. Berdasarkan teori implementasi kebijakan, keberhasilan kebijakan tersebut bergantung dari sejumlah faktor seperti sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, serta disposisi. Dengan begitu, beragam cara diperlukan dalam mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, dan mengoptimalkan sistem evaluasi untuk mendukung pencapaian SDGs 4 secara berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** kebijakan pendidikan 1, Pendidikan inklusif 2, kota Surabaya 3, implementasi kebijakan 4, SDGs 4 5

## PENDAHULUAN

Pendidikan ialah salah satu bidang yang punya peranan fundamental untuk pembentukan sumber daya manusia sekaligus menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam kerangka agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), pendidikan berkualitas termasuk dalam tujuan keempat, yaitu SDG 4: Quality Education yang berfokus pada upaya menjamin terselenggaranya pendidikan yang adil, inklusif, sekaligus berkualitas dan menunjang peluang belajar sepanjang masa untuk seluruh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang mampu meningkatkan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah di Indonesia sudah melaksanakan beragam cara dalam mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan dengan reformasi kebijakan pendidikan, peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik, serta pengembangan sistem pendidikan yang lebih inklusif. Pendidikan inklusif menjadi salah satu pendekatan penting dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan, khususnya untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. Melalui penerapan pendidikan inklusif, seluruh peserta didik diharapkan memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses layanan pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Implementasi pendidikan inklusif juga menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian target SDG 4 yang menekankan prinsip kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas dalam sistem pendidikan.

Di Indonesia, kota Surabaya menjadi salah satu kota besar yang menunjukkan komitmen yang cukup tinggi dalam mengembangkan kebijakan pendidikan yang mendukung terwujudnya pendidikan berkualitas dan inklusif. Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan berbagai kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan akses sekaligus mutu pendidikan bagi masyarakat. Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui pengembangan sekolah inklusif yang memungkinkan peserta didik dengan kebutuhan khusus melaksanakan proses belajar mengajar bersama siswa lainnya di lingkungan pendidikan yang sama.

Berbagai studi memperlihatkan bahwasanya penerapan kebijakan pendidikan inklusif di Kota Surabaya sudah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akses pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Magfiroh, Widodo, dan Radjikan (2024) menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendidikan bagi sekolah inklusif guna mendukung kegiatan pembelajaran siswa penyandang disabilitas. Penyediaan fasilitas tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk merealisasikan sistem pendidikan yang lebih merata sekaligus inklusif. Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan bahwa masih terdapat kekurangan jumlah guru pendamping khusus yang berperan membantu tahap belajar mengajar bagi siswa dengan kebutuhan khusus di sekolah inklusif.

Temuan serupa juga disampaikan dalam studi Nasrullah, Soesiantoro, dan Puspaningtyas (2025) yang memaparkan bahwasanya implementasi program pendidikan inklusif di Kota Surabaya telah mampu membuat akses pendidikan meningkat untuk anak dengan kebutuhan khusus dari program pelatihan guru, dukungan kebijakan pemerintah, hingga pengadaan fasilitas pendidikan. Program tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang semakin inklusif. Akan tetapi, penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwasanya implementasi program pendidikan

inklusif masih melewati beragam hambatan, yakni keterbatasan tenaga pendidik serta sistem evaluasi program yang belum berjalan secara optimal.

Di sisi lain, temuan Sudarto dan Sasongko (2020) menunjukkan bahwasanya implementasi pendidikan inklusif di Kota Surabaya sudah berlangsung semenjak tahun 2009 dan terus berkembang pada berbagai jenjang pendidikan. Pemerintah Kota Surabaya memberikan dukungan melalui penyediaan fasilitas pembelajaran, penugasan guru pendamping, serta penyediaan layanan pendidikan khusus bagi siswa berkebutuhan khusus. Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwasanya pemerintah daerah berkomitmen kuat untuk membentuk sistem pendidikan yang inklusif serta berkeadilan. Tapi, dalam penerapannya di lapangan masih menemui sejumlah rintangan yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut di tingkat sekolah.

Pada jenjang pendidikan menengah, penelitian yang dilakukan oleh Taufik dan Rahaju (2021) memperlihatkan bahwasanya implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada tingkat SMA di Surabaya masih melalui sejumlah hambatan, di antaranya keterbatasan jumlah guru pendamping khusus serta kurangnya fasilitas pendukung untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pendidikan inklusif telah dirancang untuk menciptakan kesetaraan akses pendidikan, implementasinya di lapangan masih belum berjalan secara optimal.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fitria (2020) terkait implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri Babatan V Surabaya memperlihatkan bahwasanya kesuksesan penyelenggaraan pendidikan inklusif sangatlah dipengaruhi berbagai faktor, seperti peran guru pendamping khusus, ketersediaan kelas khusus, serta dukungan pihak sekolah untuk membentuk lingkungan belajar yang inklusif. Dukungan melalui beragam pihak tersebut merupakan faktor fundamental untuk memastikan bahwa semua siswa mendapat peluang belajar yang sama dan berkualitas.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan antara harapan kebijakan pendidikan dengan realitas implementasinya di lapangan. Secara normatif, kebijakan pendidikan yang diterapkan diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas sebagaimana tercantum dalam tujuan SDG. Akan tetapi, pada kenyataannya implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan tenaga pendidik khusus, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, serta sistem evaluasi kebijakan yang belum terlaksanakan dengan maksimal. Keadaan tersebut memperlihatkan terdapat perbedaan antara tujuan kebijakan yang dirumuskan pemerintah dengan keadaan nyata yang ada di lapangan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan berkualitas bukan sekadar ditetapkan dari penyusunan kebijakan semata, namun sekaligus sangat dipengaruhi dari cara kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif di lapangan. Dengan begitu, peranan pemerintah sangatlah dibutuhkan untuk menangani berbagai rintangan yang timbul pada pelaksanaan kebijakan pendidikan. Permasalahan pendidikan berkualitas dapat dikategorikan sebagai public problem karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu sekaligus layak. Tanpa adanya intervensi kebijakan yang tepat, kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan berpotensi terus terjadi serta dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dari latar belakang yang dijabarkan, studi ini menjadi penting dilakukan guna menjalankan analisis implementasi kebijakan pendidikan berkualitas dalam mendukung pencapaian SDGs 4 di Kota Surabaya. Penelitian sebelumnya belum secara spesifik menganalisis keterkaitan implementasi kebijakan pendidikan berkualitas dengan pencapaian

SDGs 4 pada tingkat daerah, khususnya di Kota Surabaya. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan pendidikan yang telah diterapkan sekaligus menelaah beragam faktor yang memengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, studi ini ditujukan guna menganalisis implementasi kebijakan pendidikan berkualitas di Kota Surabaya sekaligus menelaah sejumlah faktor yang memberi pengaruh pada keberhasilannya dalam mendukung pencapaian SDGs 4.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini memakai pendekatan kualitatif melalui jenis penelitian deskriptif memakai teknik studi literatur. Data penelitian diperoleh melalui beragam sumber yakni jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, serta laporan yang berkaitan dengan implementasi pendidikan inklusif di Surabaya. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan berkualitas dalam mendukung pencapaian SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama tujuan 4 yakni pendidikan berkualitas di Kota Surabaya. Penelitian deskriptif ini ditujukan guna menjelaskan dengan cara sistematis mengenai implementasi kebijakan pendidikan, faktor-faktor pendukung, serta berbagai rintangan yang muncul dalam proses penerapan kebijakan di lapangan.

Fokus utama pada studi ini ialah implementasi kebijakan pendidikan berkualitas yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang mencakup sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, serta disposisi. Di sisi lain, studi ini pun menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier serta Van Meter dan Van Horn sebagai teori pendukung untuk menganalisis faktor lingkungan, tujuan kebijakan, dan kondisi pelaksanaan kebijakan yang memberi pengaruh pada kesuksesan penerapan kebijakan tersebut.

Objek penelitian ini adalah kebijakan pendidikan inklusif sebagai bagian dari kebijakan pendidikan berkualitas yang diterapkan di Kota Surabaya dalam rangka mendukung pencapaian SDG 4. Penelitian ini mengkaji berbagai program pendidikan inklusif, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan.

Jenis data yang dipergunakan pada studi ini yakni data sekunder yang didapat dari studi pustaka. Data dikumpulkan dari beragam sumber yakni buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen kebijakan yang relevan akan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Surabaya. Beberapa penelitian yang dijadikan rujukan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Magfiroh, Widodo, dan Radjikan (2024), kemudian penelitian Nasrullah, Soesiantoro, dan Puspaningtyas (2025), serta penelitian Sudarto dan Sasongko (2020), Taufik dan Rahaju (2021), serta Fitria (2020).

Teknik perhimpunan data dilaksanakan dengan studi literatur, yaitu melaksanakan analisis beragam hasil penelitian yang terkait akan topik pendidikan inklusif, implementasi kebijakan publik, serta pencapaian SDGs 4 pada sektor pendidikan. Data yang telah didapat lalu melalui tahap analisis memakai teknik analisis kualitatif dengan tahap reduksi data, pemaparan data, hingga pengambilan kesimpulan.

Analisis data dilaksanakan melalui proses menelaah hasil studi terdahulu yang kemudian dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan George Edward III, Van Meter dan Van Horn, serta Mazmanian dan Sabatier untuk mengetahui sejumlah faktor yang memengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan pendidikan berkualitas di Kota Surabaya. Melalui proses analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai efektivitas

kebijakan pendidikan dalam mendukung pencapaian SDG 4 serta berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya.

Metode penelitian ini dipakai sebab dianggap sejalan akan tujuan penelitian, yakni guna melaksanakan analisis implementasi kebijakan pendidikan berkualitas sekaligus menelaah tiap faktor pendukung dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di Kota Surabaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengkajian pada beragam studi terdahulu serta dokumen kebijakan yang relevan, implementasi kebijakan pendidikan berkualitas di Kota Surabaya menunjukkan perkembangan yang cukup baik dan signifikan, terutama dalam mendukung penerapan prinsip pendidikan inklusif sebagai bagian dari upaya pencapaian SDGs poin 4, yaitu pendidikan inklusif, adil, merata, dan berkualitas. Pelaksanaan kebijakan tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis, seperti pengembangan sekolah inklusif, pengadaan sarana maupun prasarana pendidikan yang ramah bagi penyandang disabilitas, peningkatan kapasitas maupun kompetensi tenaga pendidik, serta penguatan regulasi daerah yang menjamin akses pendidikan tanpa adanya diskriminasi bagi seluruh peserta didik.

Berbagai studi memperlihatkan bahwasanya kebijakan tersebut sudah memberi dampak positif pada peningkatan akses pendidikan, khususnya untuk siswa dengan kebutuhan khusus. Penelitian yang dilakukan oleh Magfiroh et al. (2024) menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan fasilitas pendidikan inklusif yang relatif memadai, walaupun masih ditemukan keterbatasan dalam jumlah guru pendamping khusus yang tersedia. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Nasrullah et al. (2025) yang memaparkan bahwasanya implementasi program pendidikan inklusif mampu meningkatkan akses pendidikan melalui dukungan kebijakan, pelatihan guru, maupun pengadaan fasilitas pendidikan yang cenderung ramah dan inklusif.

Kalau dari Sudarto dan Sasongko (2020) menjelaskan bahwa implementasi pendidikan inklusif di Kota Surabaya sudah berlangsung semenjak tahun 2009 dan terus mengalami perkembangan pada berbagai jenjang pendidikan. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih belum merata pada seluruh satuan pendidikan yang ada. Hal serupa juga diungkapkan oleh Taufik dan Rahaju (2021) yang menemukan adanya kendala berupa keterbatasan tenaga pendidik serta kurangnya fasilitas pendukung bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada tingkat pendidikan menengah. Selain itu, Setiawan dan Tohari menunjukkan bahwa pengelolaan pendidikan inklusif dalam kerangka SDGs 4 semakin terstruktur dan terarah, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan teknis di lapangan.

Secara umum, berbagai temuan tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pendidikan berkualitas di Kota Surabaya telah menunjukkan capaian yang cukup positif, khususnya dalam meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik. Akan tetapi, masih terdapat berbagai kendala struktural yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Keadaan demikian memperlihatkan terdapat ketimpangan antara kebijakan yang sudah dirumuskan secara normatif dengan realitas implementasinya di lapangan.

Pada perspektif teori implementasi kebijakan George Edward III, kesuksesan implementasi kebijakan bergantung dari 4 variabel pokok, yakni sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, serta disposisi. Dari aspek komunikasi, pemerintah daerah sudah melakukan berbagai upaya sosialisasi terkait kebijakan pendidikan inklusif kepada berbagai

institusi pendidikan. Meskipun demikian, efektivitas komunikasi tersebut belum sepenuhnya merata sehingga masih menimbulkan perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan pada tingkat sekolah.

Dari aspek sumber daya, ketimpangan jumlah guru pendamping khusus (GPK) ialah salah satu hambatan utama yang secara konsisten ditemukan dalam berbagai penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya manusia belum sepenuhnya mampu mendukung implementasi kebijakan secara optimal dan menyeluruh. Sementara itu, dari aspek disposisi, sebagian besar pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang cukup tinggi dalam mendukung pendidikan inklusif, meskipun tingkat kesiapan serta kompetensi tenaga pendidik masih bervariasi antar institusi pendidikan.

Aspek struktur birokrasi, regulasi yang telah ada pada dasarnya cukup jelas dalam mengatur pelaksanaan pendidikan inklusif. Namun demikian, koordinasi antar pemangku kepentingan masih butuh diperkuat supaya penerapan kebijakan bisa berlangsung secara lebih efektif, efisien, terarah, sekaligus berkelanjutan.

Implementasi kebijakan pendidikan di Kota Surabaya juga memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian SDGs 4, khususnya dalam meningkatkan akses pendidikan yang inklusif, mengurangi kesenjangan layanan pendidikan, serta memicu terbentuknya sistem pendidikan yang lebih adil sekaligus merata bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan inklusif tidak hanya berfungsi sebagai program sektoral semata, melainkan juga menjadi bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencapaian SDGs 4 masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pemerataan kualitas pendidikan serta penyediaan sumber daya yang memadai. Dalam konteks tersebut, implementasi kebijakan bergantung dari beragam faktor penghambat serta faktor penunjang. Faktor pendukung meliputi adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan pendidikan inklusif, keberadaan regulasi yang mendukung, peningkatan sarana maupun prasarana pendidikan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Sementara itu, faktor penghambat antara lain keterbatasan jumlah guru pendamping khusus, belum meratanya fasilitas pendidikan inklusif, sistem evaluasi kebijakan yang masih belum optimal, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Temuan ini menekankan bahwasanya kesuksesan implementasi kebijakan bukan sekadar ditetapkan dari kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan berbagai aspek pendukung dalam pelaksanaannya. Dengan begitu, dibutuhkan beragam usaha strategis dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan berkualitas di Kota Surabaya.

Sejumlah tahap strategis yang bisa dilaksanakan yakni mengupayakan peningkatan jumlah dan kompetensi guru pendamping khusus, memperkuat sistem monitoring dan evaluasi kebijakan, meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta melakukan pemerataan fasilitas pendidikan inklusif di seluruh wilayah. Dengan demikian, implementasi kebijakan pendidikan berkualitas di Kota Surabaya diharapkan dapat berjalan secara lebih optimal dalam mendukung pencapaian SDGs 4 secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

## KESIMPULAN

Dari temuan studi maupun pembahasan yang sudah dilaksanakan, implementasi kebijakan pendidikan berkualitas di Kota Surabaya dalam mendukung tercapainya SDGs poin 4, yaitu pendidikan yang inklusif, setara, dan bermutu, memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan, khususnya melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pemerintah Kota

Surabaya menunjukkan komitmen yang kuat melalui pengembangan sekolah inklusif, pengadaan sarana maupun prasarana yang ramah pada penyandang disabilitas, pelatihan serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, dan penguatan regulasi yang mendukung akses pendidikan tanpa adanya diskriminasi bagi seluruh peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Pelaksanaan kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses pendidikan serta pemerataan pelayanan pendidikan, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kondisi ini menandakan bahwa kebijakan pendidikan inklusif memiliki kontribusi secara langsung terhadap pencapaian SDGs poin 4, terutama pada aspek pemerataan akses pendidikan, pengurangan kesenjangan layanan pendidikan, serta peningkatan mutu pendidikan yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan.

Implementasi kebijakan tersebut masih belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan berbagai hambatan, seperti kekurangan jumlah GPK, belum meratanya fasilitas pendidikan inklusif di seluruh sekolah, lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, sekaligus sistem monitoring maupun peninjauan kebijakan yang belum terlaksana dengan maksimal. Berdasarkan hasil analisis memakai teori implementasi kebijakan George Edward III, kesuksesan implementasi kebijakan sangatlah bergantung pada faktor sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, beserta disposisi pelaksana. Keterbatasan pada aspek sumber daya maupun koordinasi menjadi rintangan utama yang memberi pengaruh pada efektivitas penerapan kebijakan di lapangan.

Dengan begitu, diperlukan tahapan strategis berupa pengembangan jumlah dan kompetensi guru pendamping khusus, pemerataan fasilitas pendidikan inklusif, penguatan sistem evaluasi kebijakan, serta peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan agar implementasi kebijakan pendidikan berkualitas bisa berlangsung lebih efisien, efektif, sekaligus berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan di Kota Surabaya diharapkan mampu berjalan semakin optimal dalam mendukung terwujudnya pendidikan yang berkualitas sekaligus pencapaian SDGs poin 4 secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Dari hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pendidikan berkualitas dalam mendukung pencapaian SDGs 4 di Kota Surabaya, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, maupun pihak-pihak terkait lainnya.

Pertama, Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat meningkatkan jumlah sekaligus kualitas kompetensi guru pendamping khusus (GPK) melalui pelaksanaan program pelatihan, sertifikasi, serta rekrutmen tenaga pendidik yang memiliki kemampuan dan pemahaman dalam bidang pendidikan inklusif. Upaya tersebut penting untuk dilakukan mengingat keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi salah satu kendala utama dalam penerapan kebijakan pendidikan inklusif di lapangan.

Kedua, pemerintah daerah perlu melakukan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan inklusif pada seluruh jenjang pendidikan agar setiap peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, dapat memperoleh layanan pendidikan yang setara, adil, dan berkualitas. Pemerataan fasilitas pendidikan tersebut diharapkan mampu meminimalkan kesenjangan pelayanan pendidikan antar sekolah di Kota Surabaya.

Ketiga, diperlukan adanya penguatan terhadap sistem monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan inklusif yang dilakukan secara berkala, terstruktur, dan berkelanjutan. Sistem evaluasi yang berjalan secara optimal dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai hambatan implementasi kebijakan sekaligus menentukan langkah

perbaikan yang lebih tepat dan efektif untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Keempat, koordinasi serta kerja sama antar pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, pihak sekolah, tenaga pendidik, orang tua peserta didik, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar implementasi kebijakan pendidikan inklusif dapat berlangsung secara lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. Sinergi antar pihak tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penerapan pendidikan inklusif di Kota Surabaya.

Kelima, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melaksanakan penelitian secara langsung di lapangan melalui metode wawancara, observasi, maupun dokumentasi agar dapat memperoleh data yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan pendidikan berkualitas dalam mendukung pencapaian SDGs 4 di Kota Surabaya.

## REFERENSI

- Afkar, R., Yarrow, N., Surbakti, S., & Cooper, R. (2020). Inclusion in Indonesia's education sector. World Bank.
- Fadilah, M., Utari, P., & Wijaya, M. (2022). Government communication in inclusive education. *KnE Social Sciences*.
- Fauziah, N., Maruf, N., Wardana, D. J., & Azis, F. (2025). Evaluating inclusive education initiatives in Indonesia. *Educational Process*.
- Fitria, R. (2020). Implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri Babatan V Surabaya. *Aulada: Jurnal Pendidikan dan Perkembangan Anak*.
- Harjanti, F. D., Ardiansyah, R., & Suryandari, S. (2026). Implementing SDG 4 in Surabaya. *Social Sciences & Humanities Open*.
- Hastira, M. F., & Ahmad, A. (2025). Inclusive revolution in education.
- Kaaffah, E. S., & Herlambang, Y. T. (2025). Transformation of inclusive education policy.
- Magfiroh, U. S. N., Widodo, J., & Radjikan. (2024). Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam penyediaan fasilitas murid disabilitas di sekolah inklusif Kota Surabaya Jawa Timur. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*.
- Nasrullah, R. S. P., Soesiantoro, A., & Puspaningtyas, A. (2025). Implementasi program pendidikan inklusif untuk kesetaraan pendidikan Kota Surabaya. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*.
- Rahma, S. A., Ramadhani, A. L., & Zahra, R. A. (2025). Inclusive education strategies.
- Rofiah, N. H. (2023). The progress of inclusive education toward Agenda 2030 in Indonesia. Emerald Publishing.
- Setiawan, F., & Tohari, T. (2025). Inclusive education management in Indonesia. *Journal of Education*.
- Sudarto, Z., & Sasongko, T. B. (2020). Analysis of implementations inclusive education in Surabaya City. *Jurnal Pendidikan Inklusi*.
- Taufik, A. N., & Rahaju, T. (2021). Implementasi kebijakan pendidikan inklusif untuk mewujudkan kesetaraan belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus tingkat SMA di Surabaya. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.
- Widiastuti, I. (2025). Assessing the impact of education policies in Indonesia. *Al-Ishlah Journal*.

**Copyright holder:**

© Author

**First publication right:**

Jurnal Manajemen Pendidikan

**This article is licensed under:**

**CC-BY-SA**